



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS SOSIAL**

**Jl. Jendral Ahmad Yani No.38 Blitar Telp./Fax. (0342) 801357**

**website : [www.dinsos.blitarkab.go.id](http://www.dinsos.blitarkab.go.id)**

**email : [dinsos@blitarkab.go.id](mailto:dinsos@blitarkab.go.id)**

**RENCANA STRATEGIS DINSOS  
TAHUN 2021-2026**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD merupakan pedoman bagi semua OPD, dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra OPD).

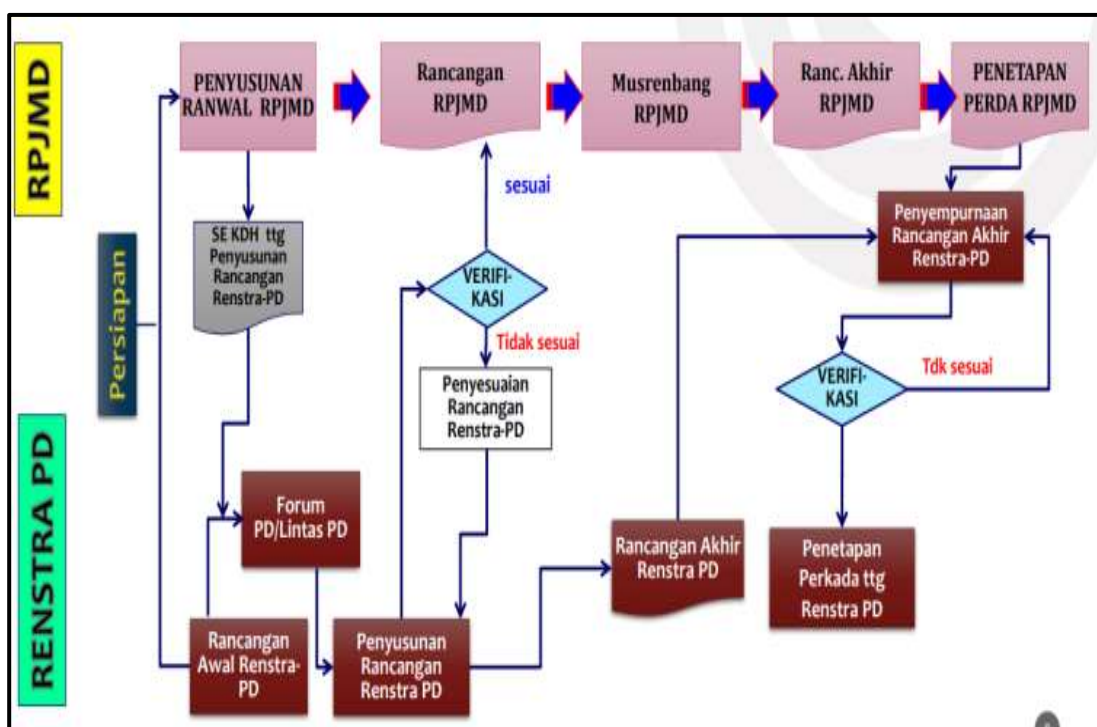
Dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Blitar, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang baru sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka OPD harus menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang tertuang di dalam dokumen RPJMD.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar mempunyai kedudukan sebagai pedoman arah dan pelayanan dalam penyelenggaraan Dinas Sosial serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa timur yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan penentuan program kegiatan sehingga dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, linier antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

Tahapan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) OPD berpedoman pada Permendagri No.86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (1). Adapun tahapan tersebut meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan renstra OPD. Adapun keterkaitan tahapan penyusunan renstra OPD dengan dokumen RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra OPD Dengan RPJMD**



Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan tugas yang terkait langsung dengan dinas sosial kabupaten Blitar, namun karena kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dan dinas terkait lainnya. Untuk itu diperlukan persepsi dan pemahaman yang sama baik dalam konsepsi program maupun implementasi dan administrasi / pengelolaan serta komitmen yang kuat antara penanggung jawab program sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawab masing – masing.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang dipakai sebagai landasan hokum dalam rangka menyusun perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27, 28 B, 33 dan 34;

- 2) Undang-Undang RI Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
- 3) Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-Undang RI no. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvesi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 6) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 7) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 8) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 9) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial lanjut Usia;
- 10) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 11) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 12) Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 13) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 14) Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 15) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 16) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 17) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 18) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah;
- 19) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 22) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;

- 23) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 26) Keppres RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- 27) Keppres RI No. 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi dan Pengembangan Generasi Muda;
- 28) Keppres RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 29) Keppres RI No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- 30) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;
- 31) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
- 32) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- 33) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsi dan Perlindungan;
- 34) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- 35) Peraturan Menteri Sosial Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- 42) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 43) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor: 120.1/010/012/2004 Dan Nomor: 460/149/409.114/2004 Tentang Kerjasama Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khususnya Anjal, Wts, Gelandangan, Pengemis Dan Gelandangan Psikotik.
- 44) Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 yaitu : memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Selain itu, Renstra juga sebagai kendali dalam menentukan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan sebagaimana target yang telah direncanakan demi mewujudkan visi Bupati terpilih yaitu : **Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia, baldatun, toyyibatun, warobbun ghofur.**

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Organisasi Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun renstra, terdapat tata cara dan sistematika penulisan yang telah di atur dalam Permendagri No.54 tentang penyusunan renstra Perangkat Daerah. Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA  
PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor: 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, di jelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No.48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu:

- 1.1.1. Memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 1.1.2. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- 1.1.3. Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- 1.1.4. Memimpin pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- 1.1.5. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- 1.1.6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.1 Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris memiliki fungsi yaitu:

- a) Memverifikasi rencana kegiatan dan program kerja dinas
- b) Mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas

- c) Mengkoordinasi penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas
- d) Mengkoordinasi pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
- e) Memimpin pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas
- f) Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
- g) Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
- h) Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **2.1.1.1 Sub Bagian Penyusunan Program**

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a) Merancang bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
- b) Merancang bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis
- c) Penyiapan bahan penyusunan laporan
- d) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
- e) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **2.1.1.2 Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) Menyusun perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan, dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas
- b) Menentukan penghimpunan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas
- c) Merancang dan menentukan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung
- d) Menyusun penatausahaan verifikasi dan pelaporan keuangan

- e) Mengkaji ulang pengujian penatausahaan verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran
- f) Membuat konsep penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor
- g) Menyusun kebutuhan operasional, verifikasi data, dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan
- h) Mengelola pengujian data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung
- i) Mengelola penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala
- b) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas
- c) Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat dinas, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan
- d) Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan
- e) Menyusun rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas
- f) Mengelola penertiban, pengamanan, pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya
- g) Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

#### **2.1.2 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dalam wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, maka Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang
- b) Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi
- c) Mengkoordinasikan para Kepala Seksi
- d) Menilai prestasi kerja bawahan
- e) Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan
- f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial
- g) Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial
- h) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### **2.1.2.1 Seksi Perlindungan Sosial**

Kepala Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- c) Menilai prestasi kerja bawahan
- d) Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran
- e) Menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial
- f) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

#### **2.1.2.2 Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial**

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan program kerja sosial
- b) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- c) Menilai prestasi kerja bawahan

- d) Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan sumber dana sosial dari masyarakat
- e) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial
- f) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan undian
- g) Melaksanakan system pengendalian intern
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

### **2.1.2.3 Seksi Jaminan Sosial**

Kepala Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Memberi petunjuk kepada bawahan
- c) Menilai prestasi kerja bawahan
- d) Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
- e) Melaksanakan jaminan sosial kepada pekerja sektor informal
- f) Melaksanakan program keluarga harapan (PKH)
- g) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

### **2.1.3 Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi kegiatan fasilitasi pengungsi, bantuan dan Perlindungan Sosial serta melaksanakan pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki fungsi yaitu:

- a) Memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Sosial
- b) Memimpin penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan Sosial
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan usaha Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial

- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengungsi dan upaya Perlindungan Sosial
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan anak, keluarga dan masyarakat
- f) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan anak, remaja (karang taruna), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), lanjut usia terlantar, keluarga dan masyarakat
- g) Memimpin pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- h) Memimpin pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan
- i) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **2.1.3.1 Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial**

Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan program seksi
- b) Merencanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, pembinaan Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan pembinaan organisasi sosial
- c) Menyusun bahan dan data dalam rangka melaksanakan pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial dan bantuan sosial kepada Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Dunia Usaha dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- d) Menentukan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat, dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial
- e) Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada dilingkungan kurang layak huni/kumuh
- f) Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil/komunitas adat terpencil (KAT)
- g) Mengembangkan monitoring terhadap sasaran bidang kelembagaan sosial
- h) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- i) Menilai prestasi kerja bawahan
- j) Melaksanakan sistem pengendalian intern

- k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

#### **2.1.3.2 Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga**

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- c) Menilai prestasi kerja bawahan
- d) Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang peran keluarga (keluarga muda mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan)
- e) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

#### **2.1.3.3 Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial**

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- c) Menilai prestasi kerja bawahan
- d) Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha Kesejahteraan social dibidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan kepahlawanan, keperintisan agar tidak terjadi pembinaan yang tumpang tindih
- f) Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pembinaan teknis
- g) Mempersiapkan bahan pembinaan kesejahteraan perintis dan keluarga pahlawan
- h) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- i) Melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

#### **2.1.4 Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial, penyandang disabilitas, pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-Lembaga Sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a) Memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi Sosial
- b) Mengkoordinasi penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi sosial
- c) Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial
- d) Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang disabilitas
- e) Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga-Lembaga Sosial
- f) Memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial bersama instansi dan lembaga-Lembaga Sosial
- g) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya

##### **2.1.4.1 Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- c) Menilai prestasi kerja bawahan
- d) Memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti maupun luar panti
- e) Mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, cacat netra (Penyandang Disabilitas Sensorik Netra), cacat tubuh (Penyandang Disabilitas Fisik), cacat mental (Penyandang Disabilitas Intelektual), tuna rungu wicara (Penyandang Disabilitas Rungu Wicara), cacat ganda (Penyandang Disabilitas Ganda Berat), dan eks penyandang cacat penyakit kronis (Eks Penyandang Disabilitas Penyakit Kronis)

- f) Melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya
- g) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

#### **2.1.4.2 Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial**

Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- c) Menilai prestasi kerja bawahan
- d) Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi wanita tuna susila, waria, ODHA, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba, psikotropika dan zat akditif (NAPZA) serta orang terlantar
- e) Menyusun rencana dan menentukan pendampingan psikotik terlantar ke Rumah Sakit Jiwa dan korban pasung
- f) Melaksanakan usaha rehabilitasi tuna sosial, eks psikotik, terlantar dan gelandangan pengemis bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya
- g) Melaksanakan koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, waria melalui kegiatan penertiban dan pemulangan
- h) Memantau perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial, eks psikotik, orang terlantar, dan gepeng (gelandangan pengemis)
- i) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

#### **2.1.4.3 Seksi Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia**

Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja rehabilitasi anak dan lansia
- b) Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka rehabilitasi anak dan lansia (bayi dibuang dan lansia terlantar)
- c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga sosial/LKSA dalam pelaksanaan rehabilitasi anak dan lansia

- d) Meningkatkan pelayanan anak di dalam dan di luar Lembaga Sosial (LKSA)
- e) Menyusun rencana dan menentukan proses perijinan pendirian LKSA
- f) Menyusun rencana dan menentukan proses pengajuan Adopsi
- g) Merencanakan dan menentukan sosialisasi ABH dan memfasilitasi kasus ABH, Anjal dan anak terlantar
- h) Merencanakan dan menentukan evaluasi, pemantauan dan pengawasan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan rehabilitasi anak dan lansia
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **2.1.5 Bidang Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penanganan fakir miskin. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Penanganan Fakir Miskin memiliki fungsi yaitu:

- a) Menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan
- b) Menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan
- c) Menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil
- d) Mengkoordinasi pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, dan dan pemetaan fakir miskin cakupan kabupaten
- e) Mengkoordinasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin
- f) Mengkoordinasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

##### **2.1.5.1 Seksi Identifikasi dan Pendataan**

Kepala Seksi Identifikasi dan Pendataan melaksanakan tugas identifikasi dan pendataan, antara lain:

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Menyusun dan menentukan kriteria fakir miskin di tingkat kabupaten

- c) Merencanakan dan menentukan pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan fakir miskin cakupan kabupaten
- d) Menyusun rencana, mengembangkan, dan menentukan pelaksanaan penguatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka identifikasi, verifikasi, validasi, supervisi, pemetaan, dan pengelolaan penanganan fakir miskin
- e) Menyusun data dan menentukan fakir miskin *by name by address* dengan ketetapan Bupati
- f) Menyusun bahan dan membuat konsep pelaporan pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, supervisi, pemetaan, dan penguatan kapasitas
- g) Menyusun rencana dan melaksanakan supervisi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **2.1.5.2 Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan**

Kepala Seksi Pendampingan Dan Pemberdayaan melaksanakan tugas pendampingan dan pemberdayaan, antara lain:

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Mengkaji bahan dan data serta membuat konsep kebijakan/pedoman/prosedur pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin
- c) Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin
- d) Membuat konsep dan mengembangkan supervisi pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin
- e) Menyusun bahan dan membuat konsep pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin
- f) Menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **2.1.5.3 Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Serta Penataan Lingkungan Sosial.**

Kepala Seksi Pengelolaan Dan Penyaluran bantuan Stimulan, Serta Penataan Lingkungan Sosial melaksanakan tugas pengelolaan dan

penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial, antara lain:

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- b) Mengkaji ulang dan menentukan bahan dan data fakir miskin calon penerima bantuan stimulan
- c) Menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan
- d) Membuat konsep dan menentukan kebijakan penataan lingkungan sosial
- e) Membuat konsep dan mengembangkan supervisi pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial
- f) Menyusun bahan dan menentukan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial
- g) Menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis penyaluran bantuan stimulan
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **2.1.6 Unit Pelaksana Teknis**

- a) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- b) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

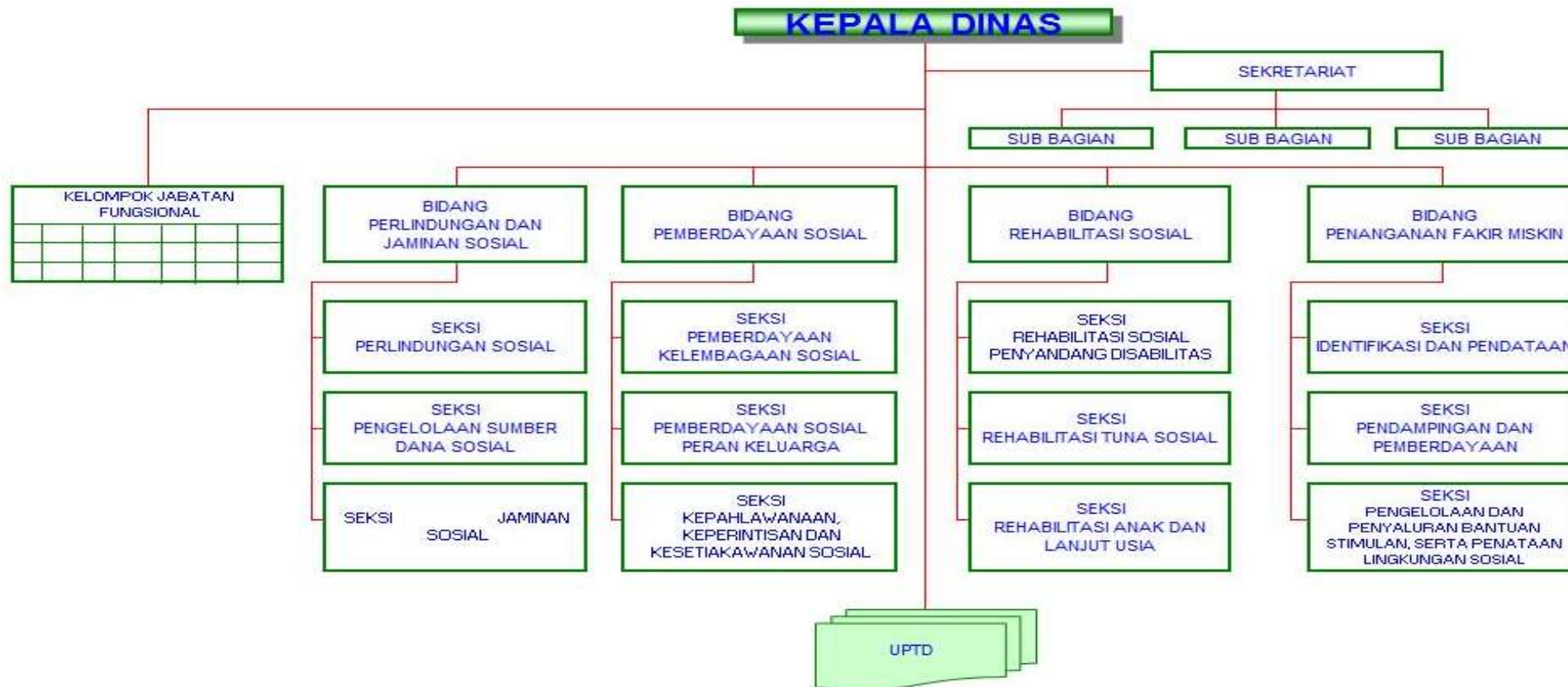
#### **2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional**

- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- c) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : - - 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL**



## 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan tenaga yang tersedia untuk menyokong dan melaksanakan tugas - tugas OPD yang termuat dalam tupoksi demi mewujudkan visi dan misi OPD. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja OPD yang sudah ditentukan.

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh dinas sosial berjumlah 54 orang, yang terdiri dari 24 orang laki - laki dan 30 orang wanita. Dari 24 orang laki- laki tersebut, sejumlah 18 orang berstatus PNS dan 6 orang berasal dari tenaga kontrak. Sedangkan dari 30 orang wanita, sejumlah 21 orang berstatus PNS dan 9 orang berasal dari tenaga kontrak. Apabila dari keseluruhan jumlah SDM tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis jabatannya, maka akan diperoleh data sesuai tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasar Kepangkatan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Jabatan</b>	<b>Jumlah SDM</b>
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris Dinas	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala Sub Bidang	3 Orang
5	Kepala seksi	11 Orang
6	Staff yang ada di sekretariat	5 Orang
7	Staff yang ada di bidang	14 Orang
8	Tenaga kontrak	15 Orang
	<b>TOTAL</b>	<b>54 Orang</b>

Jika jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial tersebut dibagi- bagi menurut tupoksi yang dibebankan serta sesuai dengan struktur organisasi Dinas Sosial, maka diperoleh kondisi bahwa Dinas Sosial masih memerlukan tambahan SDM untuk melaksanakan tupoksinya dengan maksimal karena pada setiap satu kasubbag atau kasi, idealnya memiliki dua orang staf untuk membantu pelaksanaan tugas - tugas sesuai tupoksinya. Adapun jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, maka diperoleh jumlah SDM Dinas Sosial yaitu 24 orang laki- laki dan 30 orang perempuan sesuai kurva berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Jumlah SDM Dinas Sosial**



**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan**

No	Jenis Golongan	Jumlah
1	IV / C	1 Orang
2	IV / B	1 Orang
3	IV / A	4 Orang
4	III / D	11 Orang
5	III / B	5 Orang
6	III / A	6 Orang
7	II / D	2 Orang

Untuk menunjang kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Sosial memiliki sejumlah asset. Adapun asset yang dimiliki oleh Dinas Sosial dapat diketahui dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Data Asset Dinas Sosial**

No	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1.680	Meter Persegi
2	Mobil Dinas	3	Buah
3	Ambulans	1	Buah

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
4	Motor Dinas	16	Buah
5	Mesin Tik	7	Buah
6	Mesin Hitung	8	Buah
7	Calculator	5	Buah
8	Filling Besi	11	Buah
9	Lemari kaca	10	Buah
10	Proyektor	2	Buah
11	Kursi	38	Buah
12	Personal Computer	18	Buah
13	Laptop	15	Buah
16	Printer	25	Buah
17	Lemari kayu	8	Buah
18	Penghancur Kertas	1	Buah
19	Papan Nama Instansi	3	Buah
20	Papan pengumuman	7	Buah
21	Meja Kerja Pejabat	53	Buah
22	Kursi Kerja Pejabat	18	Buah
23	Gedung/Bangunan	8	Buah

### **1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/ kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/ kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Berdasarkan Perencanaan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan kinerja instansi maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan penilaian

kinerja Tahun 2020, penilaian kinerja dimaksud dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik dan non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input, output, outcome, benefit dan impact) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung Nilai capaian indikator kinerja yang terinci sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Pemerintah Kabupaten Blitar**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani		5%		5%	5%	5%	5%	5%	4.44%	7.18%	2.54%	4.83%	5.90%	88%	143%	50%	96%	118%
2	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial		20%		20	20	20	20	20	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PMKS yang dibantu dan ditangani, ditargetkan sebesar 5 %. Pada akhir tahun 2016 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 4.44 % dengan rasio capaian sebesar 88 %. Pada akhir tahun 2017 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 7.18 % dengan rasio capaian sebesar 143 %. Pada akhir tahun 2018 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 2.54 % dengan rasio capaian sebesar 50 %. Pada akhir tahun 2019 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 4.83 % dengan rasio capaian sebesar 96 %. Pada akhir tahun 2020 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 5.90 % dengan rasio capaian sebesar 118%. Hal ini terjadi karena:

- a) Adanya **Permendagri No.86 tahun 2017** tentang: Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang mengatur formula tata cara perhitungan jumlah PMKS yang dibantu dan ditangani sehingga menghasilkan angka capaian yang berbeda juga dari tahun-tahun sebelumnya.
- b) Meningkatnya capaian realisasi kinerja di tahun 2020 (sebesar 5.90%) dari tahun 2019 (sebesar 4.83%) dikarenakan adanya perbaikan sistem pencatatan hasil kinerja masing-masing seksi sehingga lebih akuntabel dan teliti.
- c) Data capaian tersebut merupakan PMKS yang dibantu dan ditangani dari dana yang berasal dari APBD saja sehingga realisasinya hanya mencapai 5.90% dari total PMKS yang ada.
- d) Bantuan paling banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program keluarga Harapan (PKH), Peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), Bantuan pangan non tunai (BPNT), dan Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Kemudian dari Pemerintah Provinsi yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tugas dari pemerintah daerah merupakan fasilitator dari pelaksanaan program-program

tersebut sehingga tidak masuk perhitungan dalam PMKS yang dibantu dan ditangani.

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis yang kedua diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, ditargetkan sebesar 20% dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2016 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2017 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2018 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2019 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2020 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %.

Hal ini terjadi karena:

- a) Komponen PSKS yang ada di Kabupaten Blitar antara lain: ASN, Tagana, Pemuda Kampung Siaga Bencana, Toga Tomas, Pendamping PKH, TKSK, Operator Desa dan Pendamping Desa, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten.
- b) Seluruh PSKS terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga capaian kinerja mencapai 100% setiap tahunnya.
- c) Salah satu contohnya adalah program BPNT. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten berperan dalam mengkoordinasikan antara penerima manfaat, pendamping BPNT dan stakeholder yang terlibat dalam distribusi BPNT. TKSK berperan sebagai pendamping resmi di 22 kecamatan. PKH berperan sebagai pendamping peserta PKH penerima BPNT saat pengambilan bantuan dan pengurusan administrasinya. Operator desa dan pendamping desa berperan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

**Tabel 2.7**  
**Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/RENSTRA**

<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target Akhir RPJMD/RENSTRA</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)	27 PA	27 PA	100%
Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	22.02 %	29.14 %	132 %
Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	20.58 %	5.90 %	29 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga indikator kinerja yang menjadi sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang pertama yaitu Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang memiliki target sebanyak 27 PA (Panti Anak), dan hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebanyak 27 PA. Dari data tersebut, diketahui tingkat kemajuan untuk indikator tersebut yaitu 100%. Hal ini dikarenakan jumlah panti anak yang ada di Kabupaten Blitar muncul tanpa banyak intervensi dari pemerintah Kabupaten. Panti anak ini muncul dengan diprakarsai oleh masyarakat yang peduli dan menjadi agen PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sehingga Dinas Sosial hanya melaporkan jumlahnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kepedulian masyarakat yang mendirikan panti anak, mayoritas dipelopori oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar.

Indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang memiliki target sebesar 22.02 % dan hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebesar 29.14 %. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan targetnya kemudian dibuat persentase, maka akan diperoleh hasil sebesar 132 %. Persentase PMKS yang diberi

bantuan pada tahun 2020 jumlahnya sangat banyak hingga melebihi target karena berbagai hal, antara lain:

1. Adanya bencana nasional, pandemi Covid-19 yang memakan korban sangat banyak dikalangan masyarakat. Hal ini memicu pemerintah daerah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 (BANSOSDA) dalam jumlah besar.
2. Bantuan paling banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program keluarga Harapan (PKH), Peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), Bantuan pangan non tunai (BPNT), Bantuan Pangan Non Tunai Perluasan (BPNT Perluasan), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu pemerintah provinsi juga turut mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui Suplemen BPNT, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tugas dari pemerintah daerah merupakan fasilitator dari pelaksanaan program-program tersebut sehingga tidak masuk perhitungan dalam PMKS yang dibantu dan ditangani.
3. Adapun jenis- jenis golongan PMKS yang diberi bantuan terdiri dari korban bencana alam, korban bencana sosial, orang penyandang disabilitas dan Penyandang penyakit kronis, dan keluarga fakir miskin. Jumlah masing- masing golongan yang diberi bantuan yaitu seperti rincian pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Rincian Jenis PMKS yang Dibantu Tahun 2016-2021**

Jenis PMKS yang dibantu	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Korban bencana alam	895	52	124	910	145	35	1.000	537	1.000	17.300	1.000	n/a*
Korban bencana sosial	22	22	11	9	1	10	0	0	0	0	0	n/a*
Orang penyandang disabilitas dan penyandang penyakit kronis	4.326	55	3.674	110	4.699	109	0	0	4.414	227	4.414	n/a*
Keluarga Fakir Miskin	619	50	656	656	12.914	1.655	1.027	1.027	9.577	2.791	9.577	n/a*
Anak dan Lansia penghuni panti	700	1.400	2.000	3.900	2.000	1.260	2.000	3.132	2.000	1.475	2.000	n/a*

Sumber : Dinas Sosial

\* Dalam satuan Orang

\* n/a : Data tidak diketahui

Indikator kinerja yang ketiga yaitu Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki target sebesar 20.58 % dan hingga akhir tahun 2020 terealisasi sebesar 5.90 %. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan targetnya kemudian dibuat persentase, maka akan diperoleh hasil sebesar 29 %. Persentase PMKS yang ditangani pada tahun 2020 jumlahnya tidak banyak karena berbagai hal, antara lain:

1. Yang paling dibutuhkan oleh PMKS adalah bantuan yang bersifat langsung sehingga untuk penanganan seringkali hanya bersifat on call saja jika ada kasus mendadak seperti penanganan bayi dibuang, penanganan keluarga bermasalah sosial, penanganan orang terlantar maupun penanganan ODGJ terlantar.
2. Bantuan paling banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program keluarga Harapan (PKH), Peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), Bantuan pangan non tunai (BPNT), Bantuan Pangan Non Tunai Perluasan (BPNT Perluasan), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain itu pemerintah provinsi juga turut mengucurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui Suplemen BPNT, dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tugas dari pemerintah daerah merupakan fasilitator dari pelaksanaan program-program tersebut sehingga tidak masuk perhitungan dalam PMKS yang dibantu dan ditangani.
3. Adapun jenis- jenis golongan PMKS yang diberi bantuan terdiri dari korban bencana alam, korban bencana sosial, orang penyandang disabilitas dan Penyandang penyakit kronis, dan keluarga fakir miskin. Jumlah masing- masing dapat ditampilkan pada table berikut:

**Tabel 2.9**  
**Rincian Jenis PMKS yang Ditangani pada tahun 2016 – 2021**

Jenis PMKS yang ditangani	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Keluarga bermasalah sosial psikologis	237	45	136	27	194	43	111	42	111	32	100	n/a*
Keluarga fakir miskin	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	800	650	850	850	134.416	8.501	98.000	n/a*
Gelandangan dan gelandangan psikotik	n/a*	n/a*	n/a*	n/a*	38	15	39	17	39	11	15	n/a*
Penyandang disabilitas / orang dg kecacatan	4.326	400	3.674	500	915	515	915	560	4.414	227	200	n/a*
Pekerja seks komersial / Tuna Susila	48	48	82	17	16	0	19	0	19	0	0	n/a*
Anak Jalanan	46	0	94	46	20	10	22	0	22	0	100	n/a*
Anak berhadapan dengan hukum	75	0	110	49	18	0	20	0	20	0	20	n/a*

Sumber : Dinas Sosial

\* Dalam satuan Orang

\* n/a : Data tidak diketahui

**Tabel 2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kab.Blitar**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Belanja Lanjutan	7.613.661.150	8.857.944.300	8.949.839.250	9.677.403.097	6.579.168.248	6.732.091.706	7.657.235.132	7.899.361.316	8.836.871.162	6.270.884.130	88.42%	86.4%	88.26%	91.1%	95.31%	0.1%	0.1%	

Sumber : Dinas Sosial

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa anggaran Dinas Sosial Kab.Blitar berada dalam kisaran 6M hingga 8M. Mengingat besarnya jumlah PMKS yang harus dibantu dan di tangani maka tidak semua PMKS diberi bantuan dan penanganan dari anggaran yang berasal dari pemerintah daerah. Adapun bantuan paling banyak berasal dari pemerintah pusat (berupa PKH dan PBI, pemerintah provinsi (bantuan permakanan untuk disabilitas berat dan KUBE), sementara

pemerintah daerah berperan dalam fasilitasi bantuan sosial tersebut. Realisasi anggaran Dinas Sosial per tahun rata-rata berada di kisaran 80% dari anggaran total. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain dana bantuan untuk bencana baru bisa dicairkan jika terdapat bencana besar di Kab.Blitar sehingga jika pada tahun tersebut tidak ada bencana maka dana tersebut akan menjadi silpa dan penyerapan Dinas Sosial menjadi turun. Kemudian untuk tahun ke-5 realisasi anggaran besar karena terdapat pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana untuk bantuan korban bencana dapat direalisasikan dengan maksimal.

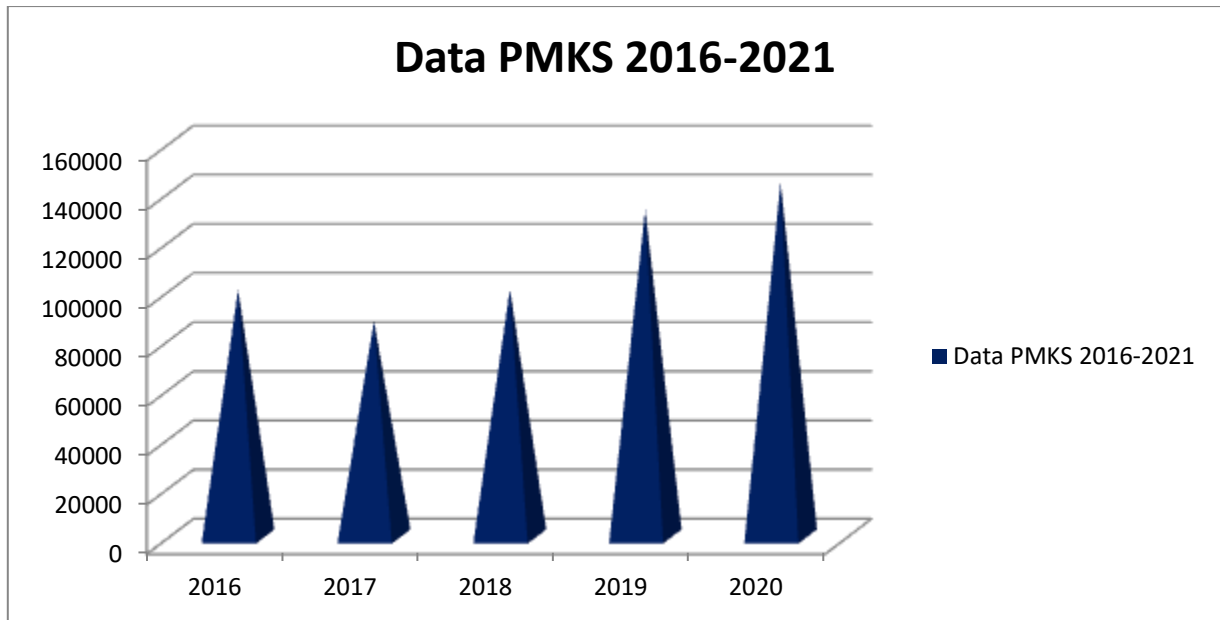
#### **1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **1.4.1. Tantangan**

Tantangan merupakan suatu keadaan di masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Blitar, dapat diketahui bahwa tantangan Dinas Sosial di lima tahun yang akan datang tidaklah mudah. Hal ini didasarkan pada beberapa kondisi yang memang masih sangat membutuhkan penanganan yang serius.

Berdasarkan dokumen RPJMD, diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.5888,79 km<sup>2</sup> atau 158,88 Ha yang terbagi kedalam 22 kecamatan, 248 desa dan 24 kelurahan. Data BPS Kabupaten Bitar mencatat bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.163.789 jiwa bertambah 3.112 jiwa dari tahun 2019 yang sebanyak 1.160.677 jiwa. Kemudian jika di sandingkan dengan data DTKS per oktober tahun 2020, jumlah rumah tangga miskin yaitu 134.416 rta. Dengan banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang ada, maka dirasa perlu untuk membuat kebijakan baru untuk menurunkan jumlah PMKS yang ada. Kemudian jika digabungkan dengan data yang berasal dari TKSK maka diperoleh jumlah total PMKS di Kabupaten Blitar dapat dicermati dalam tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Perbandingan Jumlah PMKS Tahun 2016-2021**



Kondisi Topografis Kabupaten Blitar terdiri dari pegunungan, dataran, dan pesisir dengan sepanjang sisi selatan berada di tepi pantai. Selain memberikan potensi yang positif bagi pengembangan Kabupaten Blitar, juga dapat memberikan dampak negatif bencana alam yang cukup beragam, antara lain:

1. Daerah rawan tsunami berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar, meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung
2. Daerah rawan bencana gunung berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Srengat
3. Daerah rawan banjir meliputi wilayah di sepanjang aliran sungai Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan
4. Daerah rawan angin puting beliung yaitu Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu

#### **1.4.2. Peluang**

Peluang merupakan kumpulan dari hal – hal yang berpotensi sebagai faktor penunjang keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar, maka dapat dirumuskan beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial, antara lain:

1. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang turut membantu Dinas Sosial dalam mencapai target sasaran kinerja yang

telah ditetapkan, antara lain TAGANA, PKH, TKSK, Peksos, Pensos, Korda dan Kampung Siaga Bencana. Tagana turut memberikan bantuan tenaga, seperti mendirikan dapur umum serta membantu proses trauma healing bagi korban bencana alam dan sosial. PKH memberikan bantuan program-program kementerian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin, seperti bantuan uang untuk ibu hamil miskin, bantuan uang SPP untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin, pendataan peserta penerima beras sejahtera (Rastra). TKSK memberikan bantuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data PMKS, pendampingan pendistribusian dan pembagian Rastra bersama PKH, pendampingan pendistribusian dan pembagian KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) bersama PKH. Peksos memberikan bantuan tenaga pendampingan untuk PMKS yang membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi.

2. Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tiga bidang, yang pertama yaitu bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial yang memiliki tugas utama merehabilitasi PMKS yang perlu di rehabilitasi, contohnya adalah penderita psikotik maupun lansia terlantar. Seringkali saat ditemui, penderita psikotik dan lansia terlantar tersebut ditemukan dalam kondisi sakit sehingga memerlukan bantuan penanganan dari dinas kesehatan/puskesmas terlebih dahulu sebelum akhirnya direhabilitasi oleh Dinas Sosial. Yang kedua yaitu bidang pemberdayaan sosial yang memiliki tugas utama terkait kelembagaan sosial, contohnya LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) yang menangani keluarga bermasalah. Selain LK3, ada juga YGA (Yayasan Gerontologi Abiyoso) yang menjadi wadah bagi kegiatan yang melibatkan lansia.

3. Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)

Dengan tingginya jumlah PMKS yang ada di kabupaten Blitar, sementara jumlah APBD Kabupaten Blitar yang terbatas mengakibatkan kurangnya anggaran Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS. Untuk itulah, Dinas Sosial secara aktif meminta bantuan dana dari pusat/kementerian yang berasal dari dana APBN dan dari provinsi yang berasal dari dana APBD II. Dengan adanya bantuan

dana tersebut, setidaknya jumlah PMKS yang dapat dibantu jadi lebih banyak, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh di abaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut antara lain:

1. Jumlah pertambahan PMKS yang lebih tinggi jika dibandingkan jumlah penurunan PMKS dalam 1 tahun.
2. Rendahnya keterampilan PMKS.
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam.

6. Tingginya minat PMKS untuk terus mendapatkan bantuan sehingga menyebabkan mental suka meminta.
7. Rendahnya keinginan PMKS untuk merubah kondisi hidupnya karena terlalu nyaman dalam menikmati beragam bantuan dari pemerintah.

## **1.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia”. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi dengan mengoptimalkan potensi generasi muda kabupaten blitar
3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel Inovatif dan Berintegritas
4. Percepatan pembangunan melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Berdasarkan dokumen RPJMD diketahui bahwa tupoksi Dinas Sosial terikat pada misi pertama Bupati/ Wakil bupati yaitu “Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya”. Untuk mengetahui keberhasilan misi tersebut, digunakanlah suatu instrumen untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan misi pertama Bupati/Wakil Bupati terpilih. Instrumen tersebut kemudian ditetapkan sebagai sasaran misi, yaitu “Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial” dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penurunan PMKS”. Persentase penurunan PMKS dihitung dengan rumus : Jumlah PMKS tahun n-1 dikurangi jumlah PMKS tahun n, dibagi jumlah PMKS tahun n-1 dikalikan 100%.

Dalam rangka menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial yaitu sebagai pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial maka dapat dirumuskan

beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu :

Faktor pendorong :

1. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
2. Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
3. Adanya bantuan dana dari pemerintah pusat (APBN) dan dari pemerintah provinsi (APBD 1)
4. Adanya pengembangan teknologi dan aplikasi yang memudahkan dalam pendataan PMKS

Faktor penghambat :

1. Jumlah pertambahan PMKS yang lebih tinggi jika dibandingkan jumlah penurunan PMKS dalam 1 tahun.
2. Rendahnya keterampilan PMKS.
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam.
6. Tingginya minat PMKS untuk terus mendapatkan bantuan sehingga menyebabkan mental suka meminta.
7. Rendahnya keinginan PMKS untuk merubah kondisi hidupnya karena terlalu nyaman dalam menikmati beragam bantuan dari pemerintah.

### **1.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur**

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu acuan bagi penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan agar program/ kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar tetap linier dengan program/ kegiatan Dinas Sosial Provinsi sehingga ketika pemerintah pusat menghendaki capaian dari program/ kegiatan yang disusun oleh Kementrian Sosial, pemerintah kabupaten dapat melaporkan sesuai dengan breakdown program/ kegiatan tersebut.

Dinas Sosial Provinsi telah menetapkan sasaran strategis yang dimuat dalam renstra Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Berdasarkan Sasaran Renstra**  
**Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat Dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

<b>No</b>	<b>Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov.Jatim</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Dinsos Kab.Blitar</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PMKS)	Tingginya jumlah PMKS	Jumlah penambahan PMKS yang lebih tinggi jika dibandingkan jumlah penurunan PMKS dalam 1 tahun	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
		Terbatasnya jumlah bantuan yang bisa diberikan karena keterbatasan anggaran	Rendahnya keterampilan PMKS	Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
		Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja	Adanya bantuan dana dari pemerintah pusat (APBN) dan dari pemerintah provinsi (APBD 1)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov.Jatim	Permasalahan Pelayanan Dinsos Kab.Blitar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun	Adanya pengembangan teknologi dan aplikasi yang memudahkan dalam pendataan PMKS
			Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam	
			Tingginya minat PMKS untuk terus mendapatkan bantuan sehingga menyebabkan mental suka meminta	
			Rendahnya keinginan PMKS untuk merubah kondisi hidupnya karena terlalu	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov.Jatim	Permasalahan Pelayanan Dinsos Kab.Blitar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			nyaman dalam menikmati beragam bantuan dari pemerintah	

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki arah kebijakan yang selaras dengan renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Saat Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PMKS), maka renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar mencanangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada.

#### **1.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa tujuan penataan wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pembangunan 5 tahun mendatang. Jika dihubungkan dengan tupoksi dari masing- masing OPD, Dinas Sosial tidak memiliki keterkaitan tupoksi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar.

#### **1.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Penentuan isu- isu strategis pembangunan masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada tingkat Pemerintah Provinsi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan telaah analisa

permasalahan, isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penambahan PMKS yang lebih tinggi jika dibandingkan jumlah penurunan PMKS dalam 1 tahun.
2. Rendahnya keterampilan PMKS.
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam.
6. Tingginya minat PMKS untuk terus mendapatkan bantuan sehingga menyebabkan mental suka meminta.
7. Rendahnya keinginan PMKS untuk merubah kondisi hidupnya karena terlalu nyaman dalam menikmati beragam bantuan dari pemerintah.
8. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
9. Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
10. Adanya bantuan dana dari pemerintah pusat (APBN) dan dari pemerintah provinsi (APBD 1)
11. Adanya pengembangan teknologi dan aplikasi yang memudahkan dalam pendataan PMKS

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar OPD secara langsung dapat mendukung ketercapaian visi misi Kabupaten Blitar. Penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial sangat penting, mengingat dari tujuan dan sasaran OPD ini nantinya akan membantu mencapai visi/misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya tujuan dan sasaran OPD, maka akan menjadi dasar penyusunan program/ kegiatan OPD selama 5 tahun kedepan.

Mengacu pada telaah visi misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar juga tidak terlepas dari apa yang menjadi cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang tertuang dalam visi misi dan panca kemuliaan Kepala Daerah Kabupaten Blitar. Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia”. Dari rumusan Visi dan Misi kepala daerah yang telah tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kab.Blitar merumuskan tujuan yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu “Menurunnya angka PMKS”.

Untuk itulah, dalam pembuatan tujuan dan sasaran Dinas Sosial ini sangat penting untuk mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Sosial memiliki 1 tujuan yaitu Menurunnya angka PMKS, yang ditopang oleh 2 sasaran. Berikut adalah tabel kesesuaian antara tujuan RPJMD dengan tujuan OPD.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menurunnya angka PMKS		Persentase penurunan angka PMKS	(jumlah PMKS tahun n-1 dikurangi jumlah PMKS tahun n / jumlah PMKS tahun n) x 100%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	(jumlah PSKS yang berpartisipasi / jumlah PSKS yang ada) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	(jumlah PMKS yang tertangani / jumlah PMKS yang ada) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(jumlah PMKS yang diberikan bantuan / jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki 1 tujuan yang dicapai melalui 2 sasaran. Pada masing- masing sasaran, telah dirumuskan indikator sasaran sehingga sasaran tersebut bisa diukur pencapaian kinerjanya di setiap tahun anggaran. Untuk sasaran pertama yaitu meningkatnya pemberdayaan sosial di masyarakat memiliki indikator yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial. Target dari indikator tersebut yaitu 100% di setiap tahunnya. Kemudian untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya kesejahteraan PSKS memiliki dua indikator. Indikator yang pertama yaitu persentase PSKS yang tertangani. Target dari indikator tersebut yaitu 100% di setiap tahunnya. Devinisi dari PMKS yang tertangani yaitu seluruh PMKS yang mendapatkan penanganan, seperti pendataan, verval data, fasilitasi seluruh bantuan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, pelatihan dan pembinaan, sosialisasi dan aktifitas non pemberian uang/barang lainnya. Kemudian indikator yang kedua yaitu persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Target dari indikator tersebut yaitu 100% di setiap tahunnya. Devinisi dari PMKS yang memperoleh bantuan sosial yaitu seluruh PMKS yang diberi bantuan berupa uang atau barang, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Bantuan sosial yang diberikan bisa berupa permakanan, pakaian, selimut, beras, dan alat usaha.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dengan program- program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal OPD. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal OPD, sedangkan *Opportunity* (O) dan *Threat* (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi OPD dari luar. Berikut tabel analisis SWOT Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

**Tabel 5.1**  
**Analisa SWOT Dinas Sosial**

	<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Rendahnya keterampilan PMKS
	Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
<b>KEKUATAN</b>		Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam
Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anggaran yang diterima Dinas Sosial	<b><i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada</i></b>	<b><i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru</i></b>
Adanya kecenderungan menurunnya jumlah PMKS secara total dari tahun ke tahun		<b><i>Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam</i></b>
<b>KELEMAHAN</b>	<b><i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan</i></b>	<b><i>Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri</i></b>
Rendahnya kualitas dan kuantitas penanganan PMKS		
Keterbatasan SDM sehingga data PMKS kurang akurat		
Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PMKS		

Dari tabel tersebut, diperoleh 5 strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada ( O-S )
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru ( T-S )
3. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam ( T-S )
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan ( O-W )
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri ( T-W )

Strategi- strategi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada.

Kabupaten Blitar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.163.789 jiwa (sumber RKPD Kab.Blitar), dan 134.416 rupa atau 383.754 jiwa (sumber SK Kemensos RI tahun 2020). Besarnya jumlah PMKS tersebut sementara anggaran yang ada di pemerintah daerah terbatas mengakibatkan hanya sekitar 5% saja dari total PMKS yang bias diberi bantuan dan penanganan kesejahteraan social. Oleh karena itu Dinas Sosial Kab.Blitar sangat membutuhkan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat (APBN) maupun dari pemerintah provinsi (APBD I). Seluruh bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada PMKS, dengan dibantu fasilitasi oleh Dinas Sosial dan PSKS (utamanya PKH dan TKSK). Dengan meningkatkan kualitas PSKS maka diharapkan kualitas penyaluran bantuan social dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru.

Dari 26 golongan PMKS, golongan yang paling besar berasal keluarga fakir miskin. Suatu keluarga bisa menjadi fakir miskin

dikarenakan banyak faktor, diantaranya kurangnya keterampilan manusia tersebut dalam bekerja sehingga yang awalnya mungkin tidak miskin akhirnya menjadi miskin. Kemudian kurangnya informasi terkait lapangan kerja yang ada karena terbatasnya akses informasi, komunikasi dan sosialisasi dari pihak- pihak yang membutuhkan tenaga kerja semakin memperparah kondisi keluarga fakir miskin yang berada di daerah pelosok. Untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS sehingga walaupun PMKS tersebut tidak bekerja pada orang lain, mereka masih dapat membuka usaha-usaha baru yang berpeluang menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya.

3. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

Korban bencana alam merupakan salah satu dari 26 golongan PMKS yang selalu memerlukan penanganan dan/atau bantuan sesegera mungkin, minimal bantuan untuk makanan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Blitar yang menyebabkan Kabupaten Blitar sering mengalami bencana alam seperti yang sudah dijelaskan di bab.3. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana menyebabkan jumlah PMKS meningkat karena korban bencana alam kurang memahami apa saja yang harus dilakukan untuk keluar dari masalah bencana alam. Ketika hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka bukan tidak mungkin jumlah keluarga fakir miskin akan bertambah sebagai akibat habisnya harta benda/modal mereka saat terjadi bencana. Bisa dikatakan, mereka akan menyandang gelar ganda PMKS, dari yang hanya korban bencana alam menjadi keluarga fakir miskin juga. Untuk itulah, meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam diharapkan menjadi solusi dan mencegah munculnya PMKS- PMKS baru sebagai akibat tingginya frekuensi bencana alam di Kabupaten Blitar.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan.

Untuk meningkatkan jumlah PMKS yang dapat dibantu dan/atau ditangani dalam setiap tahunnya, diperlukan optimalisasi

kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur negara yang terjun langsung menangani PMKS di lapangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab.2 bahwasanya jumlah SDM terampil di Dinas Sosial memang mengalami kekurangan jumlah dan masih jauh di bawah angka ideal. Hal inilah yang menyebabkan satu orang staff mengalami beban pekerjaan berlebih sehingga pada implementasinya menjadi kurang maksimal.

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri.

Pada tahun 2020, beberapa program bantuan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan melibatkan IT dan aplikasi, seperti aplikasi SIKS NG dan EPBI. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu dilaksanakan oleh Dinas Sosial sangat diperlukan. Misalnya pada kegiatan update jumlah data PMKS yang ada di 22 kecamatan se Kabupaten Blitar. PPTK dari kegiatan tersebut hanya 1 orang dengan dibantu 1 orang staf saja. Tentu bagi 2 orang tidak mungkin bisa melakukan update data PMKS ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Blitar dengan maksimal, seandainya bisa pun tentu data yang diperoleh tidak akurat. Untuk keperluan itulah Dinas Sosial memerlukan bantuan dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Dengan adanya TKSK, maka Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator kegiatan saja, sedangkan pelaksana teknis di lapangan adalah TKSK. Dengan melakukan strategi pihak ketiga ini diharapkan proses- proses validasi data PMKS di lapangan menjadi lebih optimal dan diperoleh data PMKS yang akurat.

## 5.2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing perspektif adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar**

No	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif masyarakat		
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial di	Program Pemberdayaan Sosial

		Masyarakat	
4	Perspektif keuangan		
<b>No</b>	<b>Perspektif</b>	<b>Strategi 2: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada</b>	
		<b>Kebijakan Umum</b>	<b>Program</b>
1	Perspektif masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Program Penanganan Bencana
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan	Meningkatkan ketepatan data DTKS melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan PSKS lainnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Perspektif keuangan		
<b>No</b>	<b>Perspektif</b>	<b>Strategi 3: Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri</b>	
		<b>Kebijakan Umum</b>	<b>Program</b>
1	Perspektif masyarakat	Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan serta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan		
4	Perspektif keuangan		

Berdasarkan analisa BSC dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki 4 kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial di Masyarakat
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
3. Meningkatkan ketepatan data DTKS melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan PSKS lainnya

4. Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan serta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Kebijakan yang telah dihasilkan oleh BSC yang bersumber dari strategi harus dapat linier dengan Tujuan dan Sasaran OPD. Berikut matriks linieritas antara tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

**Tabel 5.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan**

<b>VISI:</b> Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia			
<b>MISI:</b> Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial di Masyarakat
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
			Meningkatkan ketepatan data DTKS melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan PSKS lainnya

		Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri	Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan serta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
--	--	---	--

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

**Tabel 5.1**  
**Matriks Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021**

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
1	Menurunnya angka PMKS		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan</b>	100%	5.653.971.221
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	9 dokumen	2.086.700
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	3 dokumen	999.900

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	6 dokumen	1.086.800
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.889.205.487
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji Dan Tunjangan	38 orang	3.850.918.637
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	38.286.850
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	609.825.120
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100%	76.522.050
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	100%	22.152.570
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	100%	18.644.500
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilakukan	48 kegiatan	492.506.000
				Jumlah Makan Minum Rapat Dan Tamu	1.000 makan minum	
			Pengadaan Barang Milik	Jumlah Peralatan Dan Mesin	50 unit	187.639.300

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lainnya Yang Disediakan		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	50 unit	187.639.300
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	5 jasa	415.846.665
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	550 buah	5.250.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan	3 rekening	49.139.665
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dibayarkan	15 orang	361.475.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	77 buah	549.349.949
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dibayarkan	26 kendaraan	248.199.949
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50 buah	48.700.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	252.450.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
	<b>Menurunnya angka PMKS</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Masyarakat</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat</b>	100%	3.140.336.000
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	31 penyelenggara	30.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	31 penyelenggara	30.000.000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	12 jenis	3.110.336.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Yang Difasilitasi	22 orang	116.942.500
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Yang Difasilitasi	22 orang	237.032.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Yang Difasilitasi	113 orang	2.656.238.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
			Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kasus Berdasarkan Aduan Yang Ditangani	50 orang	100.123.500
	<b>Menurunnya angka PMKS</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan PMKS</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	100%	661.123.500
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	100%	371.727.500
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Yang Diberi Bantuan Permakanan	200 orang	327.927.500
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Yang Diberi Bimbingan	85 orang	43.800.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4 jenis layanan	289.584.380
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Paket Makanan Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Disediakan	142 paket	54.994.500
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Diberi Bimbingan	100 keluarga	96.714.880
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Yang Diberi Rujukan	11 orang	65.825.000
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 kerjasama	72.050.000
	<b>Menurunnya angka PMKS</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan PMKS</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran</b>	100%	1.519.944.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
				- Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi	100%	1.519.944.000
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang di kelola	134.416 orang	786.840.500
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) Yang Difasilitasi	45.396 KPM	733.103.500
				Jumlah Penerima PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan) Yang Difasilitasi	490.000 orang	
				Jumlah Penerima BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	93.446 KPM	
	<b>Menurunnya angka PMKS</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan PMKS</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten</b>	100%	2.150.320.400
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	100%	1.347.641.000
			Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Permakanan	17.300 orang	1.347.641.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
				Pasca Bencana		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	100%	802.679.400
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana	1 kampung	330.467.500
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana	44 orang	472.211.900
<b>TOTAL</b>						<b>13.125.883.501</b>

**Tabel 5.2**  
**Matriks Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022-2026**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	5.506.451.071	100%	6.077.684.663	100%	6.978.894.438	100%	6.996.919.894	100%	7.038.669.255	100%	<b>32.598.619.321</b>	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	9 dokumen	9 dokumen	2.148.000	9 dokumen	2.211.000	9 dokumen	2.273.000	9 dokumen	2.336.000	9 dokumen	2.402.000	9 Dokumen	11.370.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	1.029.000	3 dokumen	1.059.000	3 dokumen	1.089.000	3 dokumen	1.119.000	3 dokumen	1.151.000	3 Dokumen	5.447.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	6 dokumen	6 dokumen	1.119.000	6 dokumen	1.152.000	6 dokumen	1.184.000	6 dokumen	1.217.000	6 dokumen	1.251.000	6 Dokumen	5.923.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.005.884.000	100%	4.122.561.000	100%	4.239.237.000	100%	4.355.913.000	100%	4.479.194.000	100%	21.202.789.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji Dan Tunjangan	38 orang	38 orang	3.966.449.000	38 orang	4.081.977.000	38 orang	4.197.505.000	38 orang	4.313.032.000	38 orang	4.435.100.000	38 Orang	20.994.063.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan	100%	100%	39.435.000	100%	40.584.000	100%	41.732.000	100%	42.881.000	100%	44.094.000	100%	208.726.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
	i Keuangan SKPD	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	100%	100%	738.846.000	100%	760.366.000	100%	781.886.000	100%	803.405.000	100%	826.809.000	100%	3.583.312.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100%	100%	78.817.000	100%	81.113.000	100%	83.409.000	100%	85.704.000	100%	88.130.000	100%	417.173.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	100%	100%	22.817.000	100%	23.481.000	100%	24.146.000	100%	24.810.000	100%	25.513.000	100%	120.767.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	100%	100%	11.774.000	100%	12.117.000	100%	12.460.000	100%	12.803.000	100%	13.166.000	100%	62.320.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilakukan	48 kegiatan	48 kegiatan	297.438.000	48 kegiatan	643.655.000	48 kegiatan	661.871.000	48 kegiatan	680.088.000	48 kegiatan	700.000.000	48 Kegiatan	2.983.052.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
		Jumlah Makan Minum Rapat Dan Tamu	1.000 makan minum	1.000 makan minum	-	1.000 makan minum	-	1.000 makan minum	-	1.000 makan minum	-	1.000 makan minum		1.000 Makan Minum				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	50 unit	50 unit	204.458.000	50 unit	210.413.000	50 unit	216.368.000	50 unit	222.323.000	50 unit	228.616.000	50 Unit	1.082.178.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan Dan Mesin	50 unit	50 unit	204.458.000	50 unit	210.413.000	50 unit	216.368.000	50 unit	222.323.000	50 unit	228.616.000	50 Unit	1.082.178.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Mesin Lainnya	Lainnya Yang Disediakan													0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	5 jasa	5 jasa	462.081.000	5 jasa	475.540.000	5 jasa	488.998.000	5 jasa	502.458.000	5 jasa	516.677.000	5 Jasa	2.445.754.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	550 buah	550 buah	5.407.000	550 buah	5.565.000	550 buah	5.722.000	550 buah	5.880.000	550 buah	6.045.000	550 Buah	28.619.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan	3 rekening	3 rekening	67.304.000	3 rekening	69.264.000	3 rekening	71.224.000	3 rekening	73.185.000	3 rekening	75.256.000	3 Rekening	356.233.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dibayarkan	15 orang	15 orang	389.370.000	15 orang	400.711.000	15 orang	412.052.000	15 orang	423.393.000	15 orang	435.376.000	15 Orang	2.060.902.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	77 buah	77 buah	421.034.071	77 buah	619.422.000	77 buah	639.782.000	77 buah	660.144.000	77 buah	681.877.000	77 Buah	3.022.259.071	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dibayarkan	26 kendaraan	26 kendaraan	258.594.000	26 kendaraan	269.039.000	26 kendaraan	279.483.000	26 kendaraan	289.928.000	26 kendaraan	301.183.000	26 Kendaraan	1.398.227.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	50 buah	50 buah	80.443.000	50 buah	82.786.000	50 buah	85.129.000	50 buah	87.472.000	50 buah	89.948.000	50 Buah	425.778.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat daerah Penan ggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	81.997.071	1 gedung	267.597.000	1 gedung	275.170.000	1 gedung	282.744.000	1 gedung	290.746.000	1 Gedung	1.198.254.071	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	100%	100%	<b>3.355.967.730</b>	100%	<b>2.677.013.679</b>	100%	<b>2.929.369.648</b>	100%	<b>2.936.935.778</b>	100%	<b>2.954.459.945</b>	100%	<b>14.853.746.780</b>	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	31 penyelenggara	75 penyelenggara	30.900.000	75 penyelenggara	31.800.000	75 penyelenggara	32.700.000	75 penyelenggara	33.600.000	75 penyelenggara	34.551.000	75 Penyelenggara	163.551.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	31 penyelenggara	75 penyelenggara	30.900.000	75 penyelenggara	31.800.000	75 penyelenggara	32.700.000	75 penyelenggara	33.600.000	75 penyelenggara	34.551.000	75 Penyelenggara	163.551.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	12 jenis	12 jenis	3.325.067.730	12 jenis	3.144.204.000	12 jenis	3.233.191.000	12 jenis	3.322.178.000	12 jenis	3.416.205.000	12 Jenis	14.690.195.780	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Yang	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Yang	22 orang	22 orang	61.910.000	22 orang	63.713.000	22 orang	65.517.000	22 orang	67.320.000	22 orang	69.227.000	22 Orang	327.687.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
	Kabupaten/Kota	Difasilitasi																
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Yang Difasilitasi	22 orang	22 orang 244.14 2.000	22 orang 251.25 3.000	22 orang 258.36 4.000	22 orang 265.47 5.000	22 orang 272.98 9.000	22 Orang 1.292. 223.00 0	Dinas Sosial	Kab. Blitar							
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Yang Difasilitasi	113 orang	27 orang 2.897. 558.73 0	27 orang 2.205. 252.67 9	27 orang 2.444. 256.64 8	27 orang 2.438. 470.77 8	27 orang 2.441. 884.94 5	27 Orang 12.427 .423.7 80	Dinas Sosial	Kab. Blitar							
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	n.a	17 orang 121.45 7.000	17 orang 124.99 5.000	17 orang 128.53 2.000	17 orang 132.07 0.000	17 Orang 135.80 8.000	17 Orang 642.86 2.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar							
		Jumlah Kasus Berdasarkan Aduan Yang Ditangani		50 orang -	50 orang -	50 orang -	50 orang -	50 Orang -	50 Orang -									
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	n.a	100% 100.00 0.000	100% 100.00 0.000	100% 100.00 0.000	100% 100.00 0.000	100% 150.00 0.000	100% 550.0 00.00 0	Dinas Sosial	Kab. Blitar							
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak	n.a	100% 100.00 0.000	100% 100.00 0.000	100% 100.00 0.000	100% 100.00 0.000	100% 150.00 0.000	100% 550.00 0.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar							

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
	Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Kekerasan yang di fasilitasi																
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	n.a	100 Orang	100.00 0.000	100 Orang	100.00 0.000	100 Orang	100.00 0.000	100 Orang	100.00 0.000	100 Orang	150.00 0.000	100 Orang	550.00 0.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	<b>887.4 26.406</b>	100%	<b>932.2 12.941</b>	100%	<b>1.020.090.5 27</b>	100%	<b>1.022.725.2 71</b>	100%	<b>1.028.827.6 88</b>	100%	<b>4.891.282.8 33</b>	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	n.a	100%	581.21 1.406	100%	637.68 1.941	100%	717.22 3.527	100%	711.52 2.271	100%	708.77 5.310	100%	3.356.414.45 5	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
		Persentase Layanan yang Diberikan Kepada	n.a	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis																
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Yang Diberi Bantuan Permakanan	200 orang	200 orang 212.31 1.000	200 orang 221.40 8.000	200 orang 230.50 4.000	200 orang 239.60 1.000	200 orang 249.44 5.000	200 Orang	1.153.269.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar						
	Penyediaan sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Yang Diberi Bantuan Sandang	n.a	30 Orang 10.000 .000	30 Orang 10.000 .000	30 Orang 10.000 .000	30 Orang 10.000 .000	30 Orang 10.000 .000	30 Orang 50.000 .000	Dinas Sosial	Kab. Blitar							
	Penyediaan alat bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	3 Orang	15 Orang 30.000 .000	15 Orang 30.000 .000	15 Orang 30.000 .000	15 Orang 30.000 .000	15 Orang 30.000 .000	15 Orang 150.000 0.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar							

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial Yang Diberi alat bantu																
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial Yang Diberi Bimbingan	85 orang	15 orang 268.90 0.406	15 Orang 376.27 3.941	15 Orang 446.71 9.527	15 Orang 431.92 1.271	15 Orang 419.33 0.310	15 Orang 1.943. 145.45 5							Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial Yang Diberi akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8 Orang	10 Orang 10.000 .000	10 Orang 10.000 .000	10 Orang 10.000 .000	10 Orang 10.000 .000	10 Orang 10.000 .000	10 Orang 50.000 .000							Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantu Sosial yang di fasilitasi	5 orang	5 orang 10.000 .000	5 orang 10.000 .000	5 orang 10.000 .000	5 orang 10.000 .000	5 orang 10.000 .000	5 orang 50.000 .000							Dinas Sosial	Kab. Blitar	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberi layanan kedaruratan	10 Orang	20 Orang 30.000.000	20 Orang 30.000.000	20 Orang 30.000.000	20 Orang 30.000.000	20 Orang 30.000.000	20 Orang 30.000.000	20 Orang 30.000.000	20 Orang 30.000.000	20 Orang 30.000.000	20 Orang 150.000.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar		
	Pemberian layanan rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberi layanan rujukan	21 Orang	20 Orang 10.000.000	20 Orang 10.000.000	20 Orang 10.000.000	20 Orang 10.000.000	20 Orang 10.000.000	20 Orang 10.000.000	20 Orang 10.000.000	20 Orang 10.000.000	20 Orang 50.000.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar			
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4 jenis layanan	4 jenis layanan 306.215.000	4 jenis layanan 294.531.000	4 jenis layanan 302.867.000	4 jenis layanan 311.203.000	4 jenis layanan 320.052.378	4 Jenis Layanan 1.534.868.378	Dinas Sosial	Kab. Blitar						
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Paket Makanan Untuk Penyandang Masalah	142 paket	100 paket 96.810.000	100 paket 58.294.000	100 paket 59.944.000	100 paket 61.593.000	100 paket 63.336.378	100 Paket 339.977.378	Dinas Sosial	Kab. Blitar						

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat daerah Penan ggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Disediakan																
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Diberi Bimbingan	100 keluarga	100 keluarga 56.664.000	100 keluarga 79.630.000	100 keluarga 82.450.000	100 keluarga 85.270.000	100 keluarga 88.290.000	100 Keluarga 392.304.000							Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di reunifikasi	34 orang	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 100.000.000							Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Yang Diberi Rujukan	11 orang	15 orang 61.465.000	15 orang 63.255.000	15 orang 65.045.000	15 orang 66.836.000	15 orang 68.728.000	15 Orang 325.329.000							Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Antar	2 kerjasama	2 kerjasama 71.276.000	2 kerjasama 73.352.000	2 kerjasama 75.428.000	2 kerjasama 77.504.000	2 Kerjasama 79.698.000	2 Kerjasama 377.258.000							Dinas Sosial	Kab. Blitar	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	100%	100%	1.134.993.438	100%	1.219.764.079	100%	1.334.748.454	100%	1.338.195.913	100%	1.346.180.687	100%	6.373.882.571	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi	100%	100%	1.134.993.438	100%	1.219.764.079,00	100%	1.334.748.454,00	100%	1.338.195.913,00	100%	1.346.180.687,00	100%	6.373.882.571	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten yang di kelola	134.416 Orang	134.416 Orang	834.993.438	134.416 Orang	830.658.000	134.416 Orang	854.168.000	134.416 Orang	877.677.000	134.416 Orang	902.518.000	85%	4.300.014.438	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) Yang Difasilitasi	45.396 KPM	47.000 KPM	250.000.000	47.000 KPM	339.106.079	47.000 KPM	430.580.454	47.000 KPM	410.518.913	47.000 KPM	393.662.687	47.000 KPM	1.823.868.133	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
		Jumlah Penerima PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan) Yang Difasilitasi	490.000 Orang	450.000 Orang	-	450.000 Orang	-	450.000 Orang	-	450.000 Orang	-	450.000 Orang	-	450.000 Orang	-			
		Jumlah Penerima BSP (Bantuan	93.446 KPM	77.000 KPM	-	77.000 KPM	-	77.000 KPM	-	77.000 KPM	-	77.000 KPM	-	77.000 KPM	-			

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
		Sosial Pangan) Yang Difasilitasi															
	Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah peserta KUBE yang difasilitasi	5 kelompok	5 kelompok	50.000.000	5 kelompok	50.000.000	5 kelompok	50.000.000	5 kelompok	50.000.000	5 kelompok	50.000.000	5 kelompok	250.000.000		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	<b>1.221.503.725</b>	100%	<b>1.312.735.663</b>	100%	<b>1.436.484.258</b>	100%	<b>1.440.194.485</b>	100%	<b>1.448.787.866</b>	100%	<b>6.859.705.997</b>	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	100%	100%	484.620.725	100%	554.389.663	100%	656.676.258	100%	638.923.485	100%	624.838.866	100%	2.959.448.997	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Permakanan Pasca Bencana	1.000 Orang	1.000 Orang	424.620.725	1.000 Orang	494.389.663	1.000 Orang	596.676.258	1.000 Orang	578.923.485	1.000 Orang	564.838.866	1.000 Orang	2.659.448.997	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Sandang Pasca Bencana		100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	75.000.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah kelompok rentan yang ditangani		100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	150.000.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat		100 Orang	15.000.000	100 Orang	15.000.000	100 Orang	15.000.000	100 Orang	15.000.000	100 Orang	15.000.000	100 Orang	75.000.000	Dinas Sosial	Kab. Blitar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		Dukungan Psikososial Pasca Bencana																
															-			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten		20%	736.88 3.000	20%	758.34 6.000	20%	779.80 8.000	20%	801.27 1.000	20%	823.94 9.000	100%	3.900. 257.00 0	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Siaga Bencana		4 kampung	340.38 1.000	4 kampung	350.29 5.000	4 kampung	360.20 9.000	4 kampung	370.12 3.000	4 kampung	380.59 9.000	4 Kampung	1.801. 607.00 0	Dinas Sosial	Kab. Blitar	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana		44 orang	396.50 2.000	44 orang	408.05 1.000	44 orang	419.59 9.000	44 orang	431.14 8.000	44 orang	443.35 0.000	44 Orang	2.098. 650.00 0	3	Kab. Blitar	
<b>TOTAL</b>					<b>12.10 6.342. 370</b>		<b>12.21 9.411. 025</b>		<b>13.69 9.587. 325</b>		<b>13.73 4.971. 341</b>		<b>13.81 6.925. 441</b>		<b>65.57 7.237. 502</b>			

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tercakup dalam misi pertama yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya. Adapun sasaran yang mengarah pada misi tersebut dan terkait dengan tupoksi Dinas Sosial adalah “meningkatnya pemberdayaan sosial di masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan PMKS”. Kedua sasaran tersebut dicapai melalui 5 program dengan indikator dan target capaiannya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator tersebut dirumuskan berdasar atas beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Tingginya jumlah PMKS
2. Rendahnya keterampilan PMKS
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam
6. Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat
7. Rendahnya kualitas dan kuantitas bantuan dan penanganan PMKS

8. Kurangnya SDM yang berkualitas sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 ini pada dasarnya menjabarkan perencanaan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana perkembangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2021-2026); bagaimana mencapainya; dan langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program tercapai sesuai yang direncanakan. Perencanaan Strategis inilah yang akan mewarnai sepak terjang Dinas Sosial Kab.Blitar pada masa yang akan datang secara terencana dan terarah demi mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam VISI pemerintah daerah.

Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu atau berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kegiatan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui dana APBD/APBN maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Rencana Strategis ini berlaku untuk 5 tahun mendatang diharapkan menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kab.Blitar dan masyarakat, termasuk dunia usaha di tingkat Kabupaten. Rencana Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial ini pada dasarnya masih membuka peluang bagi penyelenggara di lapangan untuk melakukan inovasi pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

